Peranan Partai Persatuan Pembangunan dalam Membangun Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila

Sri Rahayu¹, Riski Ana Putri S², Novimah Emi Mahdiani³, Alia Rohani⁴,
Devi Rahmadani Hsb⁵

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : sriahayu100400@gmail.com¹, rizkyanaputri04@gmail.com²,
novimahemimahdiani04@gmail.com³, alyarohani54@gmail.com⁴,
Depirahmadani49@gmail.com⁵

Abstrak

Pencapaian pembangunan masyarakat dianggap sebagai bentuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial berlangsung terus menerus dalam setiap periode, baik yang direncanakan maupun tidak. Oleh karena itu, perubahan sosial adalah sesuatu yang wajar dan alami dan dialami oleh setiap masyarakat. Karena perubahan sosial merupakan dasar untuk memahami realitas pembangunan masyarakat, prinsip-prinsip umum, teori, dan kecenderungan dalam proses perubahan sosial dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena pembangunan atau pengembangan masyarakat ini. Dari segi hukum, reinterpretasi Pancasila menjadi sangat penting karena antara Pancasila, hukum dan pengalaman hidup dalam negara hukum selalu ada hubungan yang erat, saling menguntungkan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai sistem nilai abstrak merupakan landasan (spiritual) hukum positif, sedangkan hukum positif diwujudkan sebagai perwujudan sistem nilai untuk kemudahan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari; dan realitas eksperiensial merupakan hasil (produk) dari penerapan hukum positif. Jika masyarakat Indonesia dewasa ini merasa ada persoalan dalam kehidupan bernegara hukum, maka untuk memahami dan menyelesaikannya secara tuntas, harus diperhatikan secara mendalam ketiga faktor tersebut, berdasarkan kemurnian hati, pikiran dan jiwa, kearifan dan wawasan kebangsaan.

Kata Kunci: *Kesejahteraan, Perdamaian, Persatuan, Pancasila*

Abstract

Achievement of community development is considered as a form of social change process. Social change takes place continuously in every period, whether planned or not. Therefore, social change is something that is natural and natural and experienced by every society. Since social change is the basis for understanding the reality of community development, general principles, theories, and trends in the process of social change can be used to explain this phenomenon of community development or development. From a legal perspective, the reinterpretation of Pancasila is very important because between Pancasila, law and life experience in a state of law there is always a close, mutually beneficial and inseparable relationship. Pancasila as an abstract value system is the foundation (spiritual) of positive law, while positive law is realized as the embodiment of a value system for ease of use in everyday life; and experiential reality is the result (product) of the application of positive law. If the Indonesian people today feel that there are problems in the life of a legal state, then in order to fully understand and solve them, these three factors must be considered in depth, based on purity of heart, mind and spirit, wisdom and national insight.

Keywords: *Prosperity, Peace, Unity, Pancasila*

PENDAHULUAN

Pada umumnya orang mencari kondisi ideal yang sesuai dengan tatanan kehidupan yang diinginkannya. Kondisi ini menggambarkan kehidupan di mana kebutuhan dapat dipenuhi, yang tidak lagi diwarnai oleh kekhawatiran hari berikutnya, yang menyediakan iklim yang menguntungkan untuk aktualisasi diri, mewujudkan dan mencapai proses moneter yang adil secara sosial. Jadi, jika kehidupan Anda saat ini tidak memenuhi kondisi ideal tersebut, selalu ada dorongan untuk bekerja keras untuk mencapainya. Demikian juga jika ada realitas yang dipandang menghambat pencapaian kondisi ideal tersebut, maka akan mendorong upaya untuk mengubah dan memperbaikinya.

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan karena bertentangan atau paling tidak menghalangi terwujudnya kondisi ideal tersebut. Mendorong atau mengilhami munculnya upaya-upaya yang bertujuan untuk senantiasa mengubah dan memperbaiki realitas yang dianggap sebagai masalah sosial. Pada dasarnya, setiap perusahaan mengalami proses perubahan. Beberapa perusahaan berubah sangat lambat, sementara yang lain berubah dengan cepat. Pengembangan masyarakat sebagai proses menciptakan hubungan yang harmonis antara kebutuhan dan sumber daya untuk mencapai kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Semua masyarakat menginginkan situasi masa depan menjadi kehidupan yang lebih baik.

Bentuk pengkondisian yang lebih baik ini adalah pencapaian tingkat kebahagiaan atau kebahagiaan yang lebih tinggi. Ada banyak rumusan untuk menjelaskan keadaan kehidupan yang lebih baik ini, tetapi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kesejahteraan manusia akan meningkat jika semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat merupakan proses mencapai keadaan di mana semakin banyak kebutuhan dapat dipenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyadari bahwa dalam setiap komunitas terdapat sumber daya atau resources yang mampu memenuhi suatu kebutuhan. Sebagai potensi, sumber daya atau resources hanya mengandung kemampuan yang meningkatkan kesejahteraan, sehingga tidak otomatis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara efektif dan praktis, dan diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, dan diperlukan upaya untuk mengubah sumber daya potensial menjadi sumber daya aktual dalam bentuk pemanfaatan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan bertambahnya jumlah sumber daya potensial yang dapat diubah menjadi sumber daya nyata, semakin banyak manfaat yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, yang juga berarti kondisi yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, setidaknya diperlukan tiga hal untuk mewujudkan hubungan yang semakin harmonis antara kebutuhan dan potensi masyarakat, sumber daya dan peluang. Pertama, kami mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kedua, mengidentifikasi potensi, sumber daya, dan peluang yang terus berkembang. Tanpa identifikasi, potensi dan sumber daya yang ada disembunyikan dan tidak direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan. Juga, Anda harus selalu mencari alternatif baru untuk sumber daya ini. Ketiga, proses dan upaya mencari cara untuk memprioritaskan penggunaan kemampuan dan sumber daya yang ada. Selain itu, praktik pengembangan masyarakat dipandang sebagai bentuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial, baik direncanakan maupun tidak, terjadi dari waktu ke waktu dan terus menerus. Akibatnya, perubahan sosial bersifat alami dan alami dan dialami oleh semua masyarakat¹. Karena perubahan sosial merupakan dasar untuk memahami realitas pembangunan sosial, tersedia berbagai prinsip, teori, dan kecenderungan umum tentang proses perubahan sosial. Mendeskripsikan perkembangan atau perkembangan suatu masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memaknai interaksi antara anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang dengan realitas pengembangan nilai-nilai multikulturalisme dan toleransi pada masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan. Pada penelitian ini mengambil 10 anggota Partai Persatuan

Pembangunan dan masyarakat, tokoh agama dan sebagai informan dalam proses pengambilan data. Selama 2 minggu penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan dalam semua program-program Partrai Persatuan Pembangunan dan dinamika kehidupan masyarakat. Hasil pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman. Teknis analisis tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Milles dan Haberman, 2012). Data yang berhasil diperoleh kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Partai Persatuan Pembangunan Dalam Membangun Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila Pencapaian persatuan dan pembangunan masyarakat dianggap sebagai bentuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial berlangsung terus menerus dalam setiap periode, baik yang direncanakan maupun tidak. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan sesuatu yang wajar dan alami dan dialami oleh setiap masyarakat. Karena perubahan sosial merupakan dasar untuk memahami realitas pembangunan masyarakat, maka prinsip-prinsip Teori umum dan kecenderungan dalam proses perubahan sosial dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. pembangunan atau pengembangan masyarakat.

Pada dasarnya, masyarakat selalu berubah. Perbedaannya adalah bahwa ada satu masyarakat yang berubah sangat cepat dan yang lain berubah sangat lambat. Pada kondisi kedua, kemudian dicetak sebagai masyarakat yang statis, meskipun pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang sepenuhnya statis. Ini karena di setiap masyarakat ada maka dapat dibedakan dari materialis dan tidak terlihat atau idealis. Bahkan, salah satu faktor tersebut menganggap dirinya sebagai pemicu awal, karena dalam proses selanjutnya faktor-faktor lain berubah, atau setidaknya menjadi pendorong perubahan faktor-faktor lain. Kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia adalah harapan para pendiri bangsa Indonesia. Konstitusi menjadi dasar bagi upaya membangun Indonesia yang utuh dan sejahtera. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pembangunan. ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari segi hukum, reinterpretasi Pancasila menjadi sangat penting karena antara Pancasila, hukum dan pengalaman hidup dalam negara hukum selalu ada hubungan yang erat, saling menguntungkan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai sistem nilai abstrak merupakan landasan (spiritual) hukum positif, sedangkan hukum positif mewujudkan sebagai perwujudan sistem nilai untuk kemudahan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari; dan realitas eksperiensial merupakan hasil (produk) dari penerapan hukum positif. Jika masyarakat Indonesia dewasa ini merasa ada persoalan dalam kehidupan bernegara hukum, maka untuk memahami dan menyelesaikannya secara tuntas, harus diperhatikan secara mendalam ketiga komponen tersebut, atas dasar kearifan hati, hati, kecerdasan akal, dan bangsa. . kegelapan.

Menurut Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH., MSc. Awal mula krisis yang melanda kehidupan masyarakat Indonesia di bidang hukum adalah kekosongan nilai-nilai yang menjadi dasar, landasan, motivasi, sekaligus pedoman sikap dan perilaku di bidang hukum. , membuat dan menegakkan hukum. Hampir semua kegiatan di bidang hukum dilakukan secara linier, dengan menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang bersifat teknis prosedural, dengan mengabaikan persoalan-persoalan fundamental, aksioma, dan teologis. Banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi sulit untuk menilai apakah yang telah dilakukan itu benar atau salah, tidak sulit untuk menilai apa yang dilakukan itu benar atau salah, dan juga tidak jelas apa yang seharusnya menjadi tujuan dengan semua ini kegiatan.

Oleh karena itu, perlu disadari bahwa Pancasila merupakan sumber tatanan hukum atau sumber dari segala sumber hukum, serta mempertimbangkan faktor-faktor penyebab

lunturnya Pancasila dalam hukum. Pengakuan keberadaan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan akan membangkitkan praktik hukum negara Indonesia tidak hanya pada kebutuhan akan parameter hukum yang ideal seperti kepastian, keadilan dan keabsahan; tetapi juga untuk memperjuangkan tujuan mulia lainnya seperti kebahagiaan, persamaan, kekeluargaan, kesusilaan, dll. sebagaimana telah menjadi misi Pancasila.

Realitas sosial selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, realitas proses perkembangan perubahan sosial. Perubahan sosial berlangsung terus menerus dalam setiap periode, baik yang direncanakan maupun tidak. Oleh karena itu, perubahan sosial adalah sesuatu yang wajar dan alami dan dialami oleh setiap masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat terus berubah. Perbedaannya adalah bahwa ada satu masyarakat yang berubah sangat cepat dan yang lain berubah sangat lambat. Dalam rencana pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, jika proses pengembangan masyarakat dianggap sebagai proses perubahan, terutama perubahan yang direncanakan, maka ditentukan bentuk dan arah perubahan, dari diagnosis hingga mengidentifikasi sumber masalah.

Oleh karena itu, dalam proses pengembangan masyarakat, kita akan mengetahui pendekatan perbaikan dan pendekatan transformasi. Peranan Partai persatuan dalam pembangunan kedamaian masyarakat

PPP menonjolkan penataannya dengan gagasan dan penataan sistem ekonomi rakyat, terwujudnya keadilan ekonomi, penataan kerja, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penguasaan negara atas bagian-bagian ekonomi yang menguasai keberadaan banyak orang, peningkatan kerja BUMN dan BUMD, dan pemberdayaan peningkatan kepercayaan masyarakat (keluarga/unit perusahaan milik swasta) demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dan juga memiliki kemampuan yang kuat untuk secara konsisten menggerakkan kecepatan peningkatan perubahan total di semua bagian kehidupan, baik dalam elemen kerangka kerja seperti sikap dan budaya serta berjuang untuk kepuasan kebebasan umum yang mendasar, khususnya pilihan untuk menjadi individu yang otonom, hak atas keyakinan beragama dan pengurangan tekanan dalam agama, hak atas kehidupan, pekerjaan, makanan, pakaian dan tempat tinggal, hak atas kesejahteraan hidup dan terhindar dari penganiayaan, perusakan dan pencemaran, pilihan untuk memanfaatkan diri dan kesempatan untuk membuat, mengekspresikan, berfikir dan berkoordinasi, hak atas kepemilikan dan tanggung jawab yang sah, pilihan untuk menciptakan anak cucu dan menjaga kelangsungan generasi, serta lingkungan yang bermanfaat bagi peningkatan karakter dan kepribadian manusia.

Dengan demikian, yang perlu dibangun oleh PPP adalah individu dan masyarakat terbaik (khairu ummah) yang ditujukan pada kemantapan pergaulan manusia dengan Tuhan (hablum min al-Ilah), hubungan yang serasi satu sama lain, dan hubungan persahabatan antara manusia dengan sesamanya (hablum min al-nas). PPP menempatkan ikhtiar mabadi khaira ummah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya merangkai kepribadian bangsa dan budaya Indonesia dalam rangka membangun kemajuan manusia sebagai pelaksanaan misi luar biasa untuk nikmat alam semesta (rahmatan lil alamin).

SIMPULAN

Visi PPP adalah "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum telah dikemukakan memiliki kedudukan yang sangat menentukan yaitu sebagai sumber segala sumber hukum. Status tersebut tidaklah berdasarkan khayalan normatif belaka, namun atas dasar keberadaan Pancasila sebagai sumber letigimasi yang telah memenuhi kriteria seperti legitimasi sosiologis, legilitas dan legitimasi etis. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa segenap tatanan hukum harus ber hukum berdasarkan Pancasila yang telah memiliki kekuatan legitimasi mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Yogyakarta, 2010, Rangkang Education. H.L.A.Hart, *the concept of law (oxford : oxford university press, 1961)*, hlm 36.
- Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, filsafat hukum (mahzab dan refleksinya, Bandung Remadja Karya, 1989, hlm 50-51.
- Long, Norman, 1977, An Introduction to the sociology of rural development, westview Press, Boulder, Colorado.
- M. Erwin, Filsafat Hukum Refleksi terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm 235.
- Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH. MSi. Hukum dalam pelangi kehidupan, Dialektika, Yogyakarta, 2017.
- Salim, agus, 2002, perubahan sosial, Taiara Wacana, Yogyakarta. Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum, universitas muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2002, hlm
- Sekretaris Jenderral MPR RI, ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR RI 1960 sampai dengan Tahun 2020 (2001), jakarta : Setjen MPR, hlm 233-236.
- Sudarsa, Agun Gunandjar, membangun Indonesia sejahtera langkah nyata menuju visi Indonesia 2020, RMBOOKS, Jakarta, 2013.